

ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional di mana pemilihan umum (Pemilu) memainkan peran penting dalam proses pemerintahan. Berakar dalam pembukaan Konstitusi 1945 yang menekankan kedaulatan rakyat, kerangka demokratis Indonesia menjamin pemilihan umum langsung, universal, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali. Sifat demokratis Pemilu menegaskan perannya sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dan pilar demokrasi Pancasila, mencerminkan komitmen bangsa ini terhadap pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat. Ketentuan legislatif memastikan pemilu dilaksanakan secara transparan dan inklusif, memfasilitasi partisipasi luas dari berbagai latar belakang etnis, ras, agama, dan gender. Partisipasi perempuan dalam politik, didorong oleh kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mewajibkan representasi minimal 30% perempuan dalam daftar calon, mempromosikan kesetaraan gender dalam representasi politik. Meskipun langkah-langkah hukum ini, tantangan tetap ada dalam mengintegrasikan perempuan sepenuhnya dalam ranah politik, memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan. Lanskap politik Indonesia yang berkembang menunjukkan peningkatan representasi perempuan dalam lembaga legislatif, menyoroti kemajuan menuju mencapai kesetaraan gender dan tata kelola inklusif. Upaya untuk menegakkan dan merevisi hukum pemilu terus membentuk jalur demokrasi Indonesia, memastikan bahwa Pemilu tetap menjadi salah satu pilar praktik demokratis dan identitas nasional.

Kata kunci : Keterwakilan Perempuan, Partai Politik, Pemilu



ABSTRACT

Indonesia is a constitutional democracy where general elections (elections) play an important role in the government process. Rooted in the preamble to the 1945 Constitution that emphasizes the sovereignty of the people, Indonesia's democratic framework guarantees direct, universal, free, secret, and fair elections every five years. The democratic nature of the election affirms its role as a manifestation of the people's sovereignty and the pillar of Pancasila democracy, reflecting this nation's commitment to government by the people, for the people. Legislative provisions ensure that elections are conducted in a transparent and inclusive manner, facilitating broad participation from various ethnic, racial, religious, and gender backgrounds. Women's participation in politics is driven by legal frameworks such as Law No. 7 of 2017 on Elections, Requiring at least 30% representation of women on the candidate list, promoting gender equality in political representation. Despite these legal measures, challenges remain in fully integrating women in the political sphere, requiring sustained efforts to increase women's political participation and representation. Indonesia's evolving political landscape shows increased representation of women in the legislature, highlighting progress towards achieving gender equality and inclusive governance. Efforts to enforce and revise election laws continue to shape Indonesia's democratic path, ensuring that elections remain one of the pillars of democratic practice and national identity.

Keywords: Women's Representation, Political Parties, Elections

